

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Turki merupakan sebuah Negara yang istimewa. Negara transkontinental dengan luas wilayah 783.562 km<sup>2</sup> yang terletak di kawasan Euroasia atau secara geografis terletak di 2 benua, Eropa dan Asia. Wilayah Turki terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; Irak dan Suriah di tenggara; serta Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah antara Turki Eropa dan Asia.

Diawal masa pemerintahan Turki dikenal sebagai Negara yang teokratis dibawah dinasti Islamiyah dengan sistem Kesultanan atau Kekhalifahan yang kental yang dikenal dengan nama "*The Ottoman Empire*", sebelum akhirnya berubah secara resmi menjadi Negara Republik pada tahun 1923 dan berganti nama menjadi "*Republic of Turkey*" atau Republik Modern Turki.<sup>1</sup> Secara statistik demografi Turki terdiri atas populasi sekitar 80,274,604 jiwa, dengan komposisi 75% adalah etnis Turki atau Turki Anatolia, 19% adalah etnis Kurdi, serta 6% etnis minoritas lainnya seperti Georgia, Greek,

---

<sup>1</sup> Nations Online, *Republic of Turkey*, diakses dari <http://www.nationsonline.org/oneworld/turkey.htm> diakses pada 26 Oktober 2017

Assiria dan Armenia.<sup>2</sup> Dalam kehidupan Turki yang modern dan demokratis label etnis mayoritas dan minoritas masih erat melekat. Turki Anatolia merupakan etnis mayoritas dan Kurdi merupakan etnis minoritas terbesar di Turki beserta dengan beberapa etnis minoritas lainnya.

Turki sendiri merupakan Negara dengan persebaran etnis Kurdi terbesar di dunia yakni dengan estimasi 15-20 juta jiwa banyaknya, sementara etnis Kurdi lain tersebar pula di Iran, Irak, Syria dan Eropa dengan estimasi masing-masing yakni (12 juta, 8,5 juta, 3,6 juta dan 1,5 juta jiwa).<sup>3</sup> Etnis Kurdi merupakan etnis asli Timur Tengah yang juga merupakan kelompok etnis terbesar keempat di dunia. Etnis Kurdi paham betul dengan keuntungan dan momentum tersebut dimana jumlah populasi yang besar, budaya, identitas berbeda dengan mayoritas Negara tempat mereka menetap serta rasa Nasionalisme begitu tinggi yang menghubungkan satu sama lain membuat mereka terus berupaya untuk mendirikan Negara berdaulat yang kelak diberi nama Negara Sosialis Kurdistan<sup>4</sup>.

Wacana mendirikan Negara Sosialis Kurdistan sendiri bukanlah hal baru. Pasca runtuhnya Imperium Ottoman, sesuai dengan apa yang termaktub dalam Traktat Sevres, etnis Kurdi dijanjikan sebuah teritori merdeka serta pengakuan dari Inggris dan Perancis yang kala itu mengatur postur pecahan Imperium Ottoman.

---

<sup>2</sup> Index Mundi, Turkey Demographics Profile 2017, diakses dari [http://www.indexmundi.com/turkey/demographics\\_profile.html](http://www.indexmundi.com/turkey/demographics_profile.html) diakses pada 26 oktober 2017

<sup>3</sup> Institut Kurde, The Kurdish Population, diakses dari <http://www.institutkurde.org/en/info/the-Kurdish-population-1232551004> diakses pada 26 oktober 2017

<sup>4</sup> CFR, The Time of Kurds, diakses dari [http://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the\\_time\\_of\\_the\\_kurds-infoguide](http://www.cfr.org/interactives/time-kurds#!/?cid=soc-at-the_time_of_the_kurds-infoguide) diakses pada 26 oktober

Namun hingga kini janji tersebut tidak pernah terlunasi, terlebih ketika tampuk kekuasaan Turki jatuh ditangan Mustafa Kemal Ataturk yang kemudian mendorong perubahan Traktat Sevres dengan Traktat Lausanne. Berbagai keterbatasan yang ada didalam Traktat Sevres menjadi alasan kuat Ataturk dan Turki berontak demi merubah regulasi yang diatur melalui Traktat Sevres. Traktat Sevres benar-benar secara tegas memperlihatkan dominasi Inggris dan sekutu tentang tata pengelolaan Negara Turki mulai dari keamanan, administrasi, hingga keuangan. Hal ini tentu merupakan sebuah mimpi buruk. Oleh karenanya pasca memenangkan pertempuran melawan sekutu Traktat Lausanne dijadikan sebagai pedoman resmi yang mengaturnya pola bernegegara Turki. Traktat tersebut menjelaskan bagaimana Turki secara resmi merubah sistemnya yang sebelumnya menggunakan sistem pemerintahan Kekhalifahan menjadi Negara Republik,<sup>5</sup> perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum masa Traktat Lausanne ditetapkan tidak lagi berlaku. Hal inilah yang pula berdampak pada etnis Kurdi Turki, dimana mereka harus mengubur mimpi dalam-dalam untuk dapat hidup dibawah naungan negara sendiri dan hingga kini membuat mereka pecah tersebar dan tidak pernah sekalipun mencapai status Negara Bangsa.

Buah dari traktat tersebut juga menjadi bara bagi etnis Kurdi melakukan tuntutan dan perlawanan kepada Turki. Berangkat dari alasan pelanggaran atas isi Traktat dan perubahannya secara sepihak sehingga merugikan banyak pihak, khususnya etnis Kurdi Turki membuat gelora untuk memberontak dan menyatakan diri merdeka sebagai Negara Sosialis Kurdistan yang melingkupi

---

<sup>5</sup> A.E. Montgomery, "The Making of the Treaty of Sevres of 10 August 1920". *The Historical Journal*. Vol.15, No. 4, Cambridge University Press Dec., 1972,

wilayah-wilayah sentral Timur Tengah menjadi jauh semakin kuat dan eksplisit.

Awal mula etnis Kurdi hanya menempuh jalur politik dengan secara vokal menyatakan ditengah dialog atau komunikasi dengan pimpinan Negara, namun karena merasa tidak ada respon yang akomodatif dari Negara, etnis Kurdi justru merasa terdesak hasrat meredeka yang terlanjur mendarah daging. Hal ini berujung pada tindakan-tindakan arogan dan esktrimis yang jelas berbelok dari pendekatan sebelumnya. Menggunakan motif-motif ekstrimis demi mencapai tujuan merdeka dengan kekerasan, menciptakan permusuhan pada blok pemerintahan dan membentuk kelompok-kelompok militan untuk berjuang di medan perang melawan tentara Turki. Kelompok-kelompok ini secara aktif menciptakan teror dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Salah satu diantara sekian banyak front perjuangan tersebut disebut sebagai PKK atau *Partiya Karkeren Kurdistan* (Partai Buruh Kurdi). PKK merupakan sebuah kelompok militan etnis Kurdi yang didirikan pada 1978 yang berpusat di Irak Utara dengan tujuan membentuk Negara Sosialis Kurdistan. Tindakan teror yang terus dilakukan membuat mereka mendapat sorotan publik dunia. Kelompok ini kemudian dilabeli sebagai kelompok teroris Internasional oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.<sup>6</sup> PKK dikenal sebagai sebuah kelompok kiri yang begitu militan dan kuat, mereka juga sangat terorganisir dan tersebar luas khususnya di wilayah Turki, Irak dan Suriah, khususnya Turki tenggara.

Seiring berjalannya waktu kelompok ini berevolusi menjadi salah satu ancaman terbesar baik bagi pemerintah maupun masyarakat Turki. PKK melakukan

---

<sup>6</sup> United State Department of State, Foreign Terrorist Organizations, diakses dari <http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/1.htm> diakses pada 26 oktober 2017

perjuangan dengan tindakan-tindakan kejahatan yang sifatnya destruktif yang kemudian berdampak pada instabilitas atau dengan kata lain disebut destabilisasi. Destabilisasi menurut Kevin Thompson dan Lester Embree adalah serangkaian tindakan atau aksi debilitatif maupun destruktif yang bertujuan untuk membuat kondisi dari sebuah entitas politik menjadi tidak lagi diperhitungkan. Kekuatan dan pengetahuan dari entitas tersebut dianggap semu dan hampa karena akan kehilangan arah dan tujuan sehingga sangat mudah dipengaruhi dan diserang secara terus menerus. Kelemahan tersebut tercermin baik secara etik mengenai sikap dan politik mengenai kebijakan.<sup>7</sup>

Dalam masa pemerintahan Presiden Erdogan, eskalasi konflik terus meningkat. Rentetan teror terus dilancarkan oleh PKK untuk menunjukkan kekuatannya kepada Turki dan dunia Internasional. Mulai dari kontak senjata, pembunuhan massal personil keamanan, penculikan terhadap masyarakat sipil, bom bunuh diri di tempat umum seperti pos polisi, jalan raya, bahkan lokasi pernikahan adalah deretan peristiwa yang menggambarkan kelompok militan yang dimotori dan didirikan oleh Abudullah “Apo” Ocallyan ini.

Dampak dari tindakan ini tidak hanya membuat pemerintah geram tetapi juga masyarakat, mengingat ini adalah konflik lintas teritori yang melibatkan lebih dari 2 batas wilayah Negara dampak kerusakan yang timbul pun bisa jadi jauh lebih besar.<sup>8</sup> Hal ini diperkuat dengan motif PKK yang bukan hanya ingin mencapai tujuan deklarasi Negara Sosialis Kurdistan tetapi pula sebagai arena unjuk kekuatan agar mendapat pengakuan publik

---

<sup>7</sup> Kevin Thompson, Lester Embree, *Phenomenology of The Political* (Memphis: Springer Science and Business Media), hlm. 197.

<sup>8</sup> Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Terj. Dadan Suryadipura (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 13.

luas. Sesuai dengan paham eksistensialisme bahwa perluasan kekuatan dan kekuasaan menjadi sebuah hal yang dikejar dan diupayakan secara terus-menerus. Dalam hal ini yakni manifestasi perjuangan PKK yang terus berdampak mayor pada kondisi Turki sebagai negara berdaulat.

Instabilitas Turki kian memunculkan efek domino bagi sektor-sektor domestik lain yang ikut goyah akibat bombardier PKK mulai dari sosial dan budaya, politik hingga ekonomi. Ketakutan dan kekhawatiran akan teror juga berdampak pada lumpuhnya aktifitas masyarakat. Ini menjadi catatan hitam dalam era pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan karena tren konflik antara PKK dan Turki yang kian memburuk.

Dengan semakin tingginya potensi ancaman PKK dan goyahnya stabilitas Turki, maka akan menjadi sebuah pekerjaan besar untuk diselesaikan bagi Erdogan dan seluruh jajarannya. Turki yang berubah semakin waspada pun harus siap merespon destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan dengan tindakan serta langkah yang tepat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yakni sebagai berikut :

*“Bagaimana upaya yang diambil oleh Turki dalam merespon destabilisasi yang dilakukan oleh PKK?”*

## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan sebuah teori dan konsep. Teori yang akan digunakan oleh penulis yakni “Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri” yang dikemukakan oleh “William D. Coplin” yang berpandangan bahwa kebijakan luar negeri harus ditelaah dari pemimpinnya terlebih dahulu, mengingat bahwa pembuatan kebijakan oleh seorang pemimpin Negara pastinya atas berbagai konsiderasi. Kemudian konsep yang akan digunakan ialah Konsep “*Dimensi Strategi - Military Operations*” yang dikemukakan oleh Colin S. Gray seorang professor Hubungan Internasional dan Ahli strategi University of Reading. Colin berpandangan bahwa dalam setiap masalah yang dihadapi, Negara memiliki sebuah dimensi khusus yang jauh lebih kompleks dan detail sehingga. Dimensi tersebut kemudian menjadi sebuah pilihan yang akan diterapkan baik dalam bentuk keputusan maupun kebijakan untuk merespon masalah atau kasus yang tengah terjadi.

### ***1. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri***

Dalam perkembangan studi ilmu hubungan internasional, telah banyak bermunculan aktor-aktor yang memiliki signifikansi dan peran vital sesuai dengan berbagai perubahan era yang begitu dinamis. Sekalipun begitu, peran negara sebagai suprastruktur paling vital hingga kini tetap tidak akan tergantikan. Negara tetap memegang peran terpenting baik dalam perkembangannya, pembuatan kebijakannya, hingga faktor-faktor yang lain.

Salah satu peran penting negara adalah dalam pembuatan keputusan baik dalam maupun luar negeri. Keputusan luar negeri berkaitan dengan arah,

tujuan dan gambaran baik sikap maupun tindakan yang diambil negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Hal tersebut kemudian dikaji oleh William D. Coplin yang disebut dengan Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri, dimana ia mencoba mengkaji terkait perilaku interaksi negara dalam tatanan internasional dan faktor-faktor determinan penentu interaksi tersebut. Menurut Coplin setidaknya ada tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan politik luar negeri suatu negara, antara lain :

**a. Kondisi Politik Domestik**

Menurut Coplin kondisi atau situasi politik domestik menjadi salah satu faktor penting penentu pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. Kondisi politik disini bukan hanya berbicara mengenai status politik suatu negara tetapi juga pada tataran aktor-aktor yang memiliki peran didalamnya. Aktor-aktor tersebut merupakan mereka yang memiliki pengaruh pada sebuah kebijakan. Politik domestik juga dijadikan sebagai pertimbangan karena kondisi politik domestik akan mencerminkan apa saja yang menjadi kebutuhan dan kepentingan suatu negara dalam melakukan aktivitas atau interaksi global.

**b. Situasi Ekonomi dan Militer**

Sebagai instrumen ganda yang masuk dalam cakupan *high politics*, ekonomi dan militer menjadi begitu penting dalam pengambilan keputusan luar negeri yang dilakukan oleh



suatu negara. Hal ini diindikasikan oleh betapa faktor-faktor ini menjadi prioritas yang terus dibangun oleh masing-masing negara. Ekonomi berkaitan dengan nilai tawar dan nilai jual yang dimiliki oleh suatu negara, sementara militer berkaitan dengan kekuatan fisik suatu negara. Jelas bahwa semakin kuat perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin dominan pula pengaruh dan peran negara tersebut.

### **c. Konteks Internasional**

Faktor terakhir adalah kondisi internasional yang berkaitan dengan hal-hal yang berasal dari luar batas wilayah dan pengaruh suatu negara. Dalam teorinya Coplin menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga elemen konteks internasional yakni geografis yang menyangkut batas-batas kaku wilayah, ekonomi yang berkaitan dengan kemampuan penganggaran dan finansial negara serta politik tentang arah kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil negara. Faktor internasional menjadi penting karena pembuatan keputusan luar negeri bukan hanya melihat bagaimana sasaran dari keputusan tersebut, tetapi juga harus melihat bagaimana sumber dari keputusan tersebut.

Dalam sepak terjangnya dalam pengambilan keputusan luar negeri, Turki melakukan tindakan atau aktifitas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Coplin. Melalui Erdogan sebagai pemangku kepentingan tertinggi, Turki mengambil sebuah keputusan final yang adalah melakukan keputusan operasi militer.

Pertimbangan Turki meliputi kodnisi politik domestik, ekonomi militer dan internasional.

Segi politik merupakan faktor paling mayor yang memutuskan Turki untuk mengambil langkah operasi militer. Hal ini karena kondisi politik domestik Turki yang sangat instabil yang dicerminkan oleh dua faktor pertama adalah terbelahnya parlemen menjadi kubu AKP yang merupakan basis pemerintah dan HDP yang pro Kurdistan, serta kekacauan karena tekanan yang terus diberikan masyarakat karena kredibilitas yang terus dipertanyakan. Selanjutnya adalah terkait ekonomi dan militer dimana dua hal ini saling berkesinambungan, Turki menjadi salah satu negara yang baik dalam pertumbuhan ekonomi namun sedikit banyak terpengaruh karena destabilisasi yang dilakukan PKK. Akan tetapi mengingat sumber daya modal yang masih memadai dan militer yang sangat baik dari segi tentara serta sistem teknologi persenjataan membuat Turki bersiap untuk menghadapi tekanan PKK, hal ini juga ditunjukkan dengan gelontoran dana besar-besaran yang dianggarkan oleh Erdogan sebagai anggaran militer. Faktor terakhir adalah faktor internasional. Kondisi yang sangat genting tidak hanya terlihat dari situasi domestik melainkan juga internasional. Dimana PKK yang berasal dari etnis Kurdi terus melakukan destabilisasi pada Turki. Selain itu tindakan yang sama juga terjadi di berbagai negara lainnya seperti Irak, Iran dan Suriah, hal ini membuat negara-negara tersebut menghadapi ancaman yang sama. Keputusan menggunakan ketakutan militer tidak menjadi isapan jempol belaka, selain berbagai keputungan ke markas PKK, latihan militer yang dilakukan bersama antara Irak, Iran dan Turki menjadi bentuk keseriusan mereka dalam menangani kasus gerakan-gerakan radikal yang berupaya mendirikan Negara Sosialis Kurdistan tersebut.

## 2. *Konsep Military Operations (Colin S. Gray)*

Konflik adalah sesuatu yang secara alami terjadi dalam kehidupan manusia baik individual maupun sosialnya. Dalam menjalankan hubungan, interaksi dan komunikasi konflik rentan terjadi karena perbedaan harapan, fokus dan kepentingan antara aktor-aktor yang terlibat didalamnya. Konflik sering kali diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan oleh aktor karena hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting selain situasi, bantuan dan hal lain. Penggunaan kekuatan tersebut bukan hanya bermotif penanganan atas konflik yang terjadi tetapi juga terkadang bermotif deterensi. Satu diantaranya adalah penggunaan kekuatan militer.

Sejak era awal perkembangan Ilmu Hubungan Internasional kekuatan militer telah menjadi indikator kekuatan suatu negara dan proses penanganan konflik yang paling efektif. Dalam implementasinya penggunaan kekuatan militer bisa ditujukan untuk banyak hal dan tujuan namun umumnya kekuatan militer dijadikan sebagai bagian dari sebuah bentuk kebijakan atau peraturan. Substansinya adalah terkait upaya merespon sesuatu baik ancaman, teror hingga perang antara entitas politik tertentu.

Dengan melihat militer sebagai aspek penting bagi negara untuk mencapai tujuannya, Colin kemudian merumuskan konsep strategi yang tertuang dalam buku "*Modern Strategy*". Militer dianggapnya penting karena mampu menembus segala lini atau bersifat pervasif. Strategi ini meliputi berbagai dimensi yang dianggapnya kontributif dalam penyusunan dan pencapaian suatu kepentingan Negara. Dimensi ini bertindak sama halnya seperti akar strategi yakni menjadi jembatan atau penghubung penggunaan kekuatan militer dengan tujuan

yang ingin dicapai, dimana tujuan ini dipersepsikan sebagai sebuah keinginan Negara.<sup>9</sup>

Colin berargumen bahwa pasca periode perang dingin polarisasi kekuatan tidak lagi berpusat pada satu dimensi baik wilayah, waktu maupun tempat. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan aktor-aktor hubungan internasional, termasuk perkembangan strategi yang menjadi pilihan bagi suatu negara dalam merespon konflik. Strategi diyakininya dapat menjadi refleksi bagi negara tersebut, jika negara tersebut memilih strategi besar maka kekuatannya adalah besar pula. Sebaliknya jika negara memilih strategi sederhana maka kekuatannya adalah terbatas.

*“strategy is the bridge that relates military power to political purpose; it is neither military power per se nor political purposes. The use that is made of force and threat of force for the ends of policy”*

Pernyataan tersebut merupakan pemahaman mendasar dari Colin untuk menjelaskan tentang konsep strategi yang dimilikinya. Dimana menurut Colin strategi dapat dibagi menjadi “Operasi Militer, Komando, Geografis, Friksi dan lawan”. Strategi-strategi tersebut adalah sebuah penghubung dari penggunaan kekuatan militer untuk mencapai kepentingan atau tujuan politik tertentu serta mencapai titik puncak dalam proses penyelesaian

Gray membagi dimensi-dimensi tersebut antara lain Operasi Militer yang berkaitan dengan mobilisasi armada, Komando berkaitan dengan legitimasi serta otoritas pimpinan militer, Geografis yang berkaitan dengan empat ruang lingkup perkembangan militer (air,

---

<sup>9</sup> Clausewitz, Clausewitz: Toward a Theory of Applied Strategy, diakses dari

<http://www.clausewitz.com/readings/Echevarra/APSTRAT1.htm>

diakses pada 20 November 2017

darat, laut dan ruang angkasa) serta Friksi dan Lawan yang berkaitan dengan kesesuaian antara tingkat konflik masing-masing aktor. Dimana dalam kasus ini Operasi militer adalah pilihan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pilihan operasi militer digunakan dalam dua kondisi yakni pertama Negara dalam keadaan tidak stabil dimana terjadi serangan baik intra atau inter dan negara diposisikan sebagai satu-satunya aktor dalam kasus tersebut. Kedua adalah ketika negara ikut berpartisipasi dan bekerjasama guna menyelesaikan permasalahan entitas politik lain dimana sebuah negara menjadi faktor komplemen untuk negara lainnya.<sup>10</sup>

Operasi militer sendiri merupakan sebuah dimensi strategi yakni dengan merencanakan dan menggerakkan angkatan bersenjata atau tentara dengan mengadakan serangan langsung terhadap pihak yang dianggap musuh. Keputusan menggunakan operasi militer akan mengabaikan seberapa kompleks hubungan antar kedua belah pihak yang berseteru, serta mengabaikan pula seberapa banyak pencapaian atau kesempatan yang telah diperoleh oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Dalam strategi tidaklah penting seberapa luar biasa strategi tersebut jika tidak sama sekali dieksekusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suksesnya sebuah operasi militer untuk mencapai kepentingan suatu negara, yakni antara lain :

1. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah berdaulat
2. Kekuatan Militer mendapat suplai

---

<sup>10</sup> Colin S. Gray, *Modern Strategy* (United States : Oxford University Press, 1999), hlm. 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, 1999, hlm. 38

3. Memiliki sistem persenjataan mumpuni dan peralatan militer yang cukup baik
4. Tentara yang siap berperang

Apabila faktor-faktor tersebut telah terpenuhi maka akan sangat mudah bagi sebuah negara untuk mencapai kepentingan atau harapannya.<sup>12</sup>

Dalam studi kasus konflik yang terjadi antara Turki dan PKK yang berlarut, PKK telah memberikan banyak dampak negatif pada perkembangan negara, dilain sisi ini juga membuktikan bahwa PKK bukan hanya kelompok militan transnasional biasa, mereka yang sangat teroganisir ini dapat menjadi ancaman serius bukan hanya stabilitas Turki secara makro dengan konfrontasi bersenjata dan teknik teror lainnya tetapi juga kepada keamanan pemerintah, aparat dan masyarakat sipil secara luas.

Sebagai bentuk tindakan Turki demi menjaga keamanan dan stabilitas Negara maka tentu dibutuhkan strategi yang tepat dalam merespon konflik tersebut. Dalam konflik ini Erdogan sebagai pemimpin Turki memilih untuk menggunakan Operasi militer. Pemilihan ini didasarkan pada kondisi instabil yang terjadi. Dimana Turki melakukan mobilisasi kekuatan militer dalam bentuk operasi militer Turki. Tindakan asertif ini dilakukan dengan menargetkan pusat serangan ke markas pusat PKK di Irak Utara dan melakukan penangkapan.

---

<sup>12</sup> Ibid, 1999, hlm. 39.

## **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah dan dasar pemikiran diatas, maka hipotesis yang muncul dari strategi Turki dalam merespon destabilisasi oleh PKK yaitu :

*“Turki merespon tindakan destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan melalui keputusan luar negeri dengan melakukan operasi militer mempertimbangkan kondisi politik domestik, situasi ekonomi dan militer serta konteks dunia internasional dengan tujuan mengembalikan stabilitas Negara”*

## **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yakni :

- a) Penulis ingin mengetahui lebih lanjut dan berharap pembaca juga dapat memahami mengenai Turki, Kurdi dan PKK serta secara khusus tentang bagaimana upaya Turki dalam meredam destabilisasi yang dilakukan oleh Partiya Karkeren Kurdistan
- b) Penulis ingin menjadikan tulisan ini sebagai kontribusi akademik terhadap isu konflik etnis Kurdi secara umum dan PKK secara khusus di Turki serta mengetahui penyelesaiannya.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan jangkauan dalam penelitian yakni selama masa pemerintahan presiden Recep Tayyip Erdogan yang dimulai sejak 2014-sekarang. Alasannya adalah masa ini

merupakan masa dengan perlawanan terkuat oleh PKK dan dampak destabilisasi yang terjadi juga memburuk.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yang diperoleh dari studi literatur yang mengutamakan data tertulis dalam bentuk cetak dan elektronik seperti buku, jurnal, berita, *e-book* dan beberapa sumber literatur serta internet lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan penulisan ini. Dengan kata lain metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

## **H. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Dinamika Hubungan Turki dan Kurdi**

Bab II akan diuraikan mengenai sejarah Kurdi dan PKK di Turki serta perkembangan hubungan antara Turki dan PKK pada era pemerintahan Recip Tayyip Erdogan.

### **Bab III : Destabilisasi Turki yang dilakukan oleh PKK**

Bab III akan diuraikan mengenai tindakan-tindakan destabilisasi yang dilakukan oleh PKK di Turki serta dampak dari tindakan destabilisasi tersebut.



**BAB IV** : Upaya Turki dalam Meredam Destabilisasi oleh PKK

Bab IV akan diuraikan mengenai strategi Turki dalam meredam destabilisasi yang dilakukan oleh PKK, termasuk analisis kekuatan Turki dalam keputusan tersebut.

**Bab V** : Kesimpulan

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.